

**FINANCIAL DEVELOPMENT DAN PENGARUHNYA PADA
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI WILAYAH
INDONESIA BAGIAN TIMUR**

Fahrul Riza

Program Studi Manajemen, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, friza@bundamulia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh dari pengembangan sektor keuangan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga pada propinsi yang berada di Wilayah Bagian Timur Indonesia. Model regresi data panel digunakan dengan memperlakukan data pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai peubah terikat, tabungan dan kredit konsumtif dari sektor rumah tangga sebagai peubah bebas. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan di Wilayah Bagian Timur di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tabungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga, sementara pinjaman konsumtif memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Kata Kunci: sektor rumah tangga, tabungan, pinjaman, pengeluaran konsumsi.

ABSTRACT:

This paper empirically investigates the relationship between financial development and household consumption expenditure at Eastern Indonesia Region. Panel data regression models are applied to consumption expenditure data as dependent variables, savings and consumer loans from the household sector as independent variables. The results of this research suggest that financial development in Eastern Indonesia Region have a significant impact on household consumption expenditure. Savings have a significant positive effect on increasing household consumption expenditure, meanwhile consumer loans have a significant negative effect on increasing household consumption expenditure.

Keywords: household sector, saving, loans, consumption expenditure

Kata Kunci: Huruf Times News Roman, Ukuran 12 poin dan tidak lebih dari 5 kata kunci

PENDAHULUAN

Sektor keuangan merupakan salah satu dari tulang punggung ekonomi negara karena memiliki peranan yang vital dalam mendukung kegiatan ekonomi (Setiawan, 2015). Pembangunan sektor keuangan dapat dianggap sebagai elemen strategis dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional. Dengan perkembangan sektor keuangan, diharapkan fungsi intermediasi keuangan (melalui lembaga keuangan dan pasar keuangan) dapat berkembang secara optimal (Levine, 2005).

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Berdasarkan tinjauan literatur, tingkat pengembangan sektor keuangan secara positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Cihák, et al., 2012). Dalam hubungan ini, indikator utama yang digunakan untuk mengukur kedalaman keuangan lembaga keuangan di negara tertentu adalah kredit swasta. Semakin tinggi rasio kredit swasta terhadap PDB negara tertentu, semakin tinggi pengembangan keuangan lembaga keuangan di negara tersebut. Sektor perbankan adalah lembaga keuangan yang secara umum mendominasi penyaluran kredit swasta.

Dari beragam penelitian yang telah dilakukan beberapa temuan yang menunjukkan hasil yang bertentangan. Seperti temuan Sehwat dan Giri (2016) yang menunjukkan bahwa manfaat dari pembangunan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi ini belum merata dan menjangkau ke hingga ke masyarakat berpendapatan rendah. Temuan lain adalah bahwa informasi asimetris menyebabkan terjadinya pasar persaingan tak sempurna di pasar keuangan sehingga kontribusi dari sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi akan terganggu (Stiglitz, 2000). Ketidakefektifan pasar akan membuat manfaat dari perkembangan di sektor keuangan didistribusikan secara tidak merata (Levine et al., 2000).

Financial development akan mendiversifikasi investasi ke berbagai lembaga perantara investasi, sehingga mengeliminir resiko dari investasi. Turunnya biaya transaksi dalam mengumpulkan informasi dari para lembaga perantara investasi dan meningkatnya akumulasi modal. Perkembangan sektor keuangan juga membuka akses kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga akan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan aset produktif, sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan (Odhiambo, 2010).

Pemerintah bersama dengan Pemerintah Australia dan Swiss dan berbagai lembaga keuangan terkait merilis hasil survei bersama yang dinamakan Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) terkait dengan inklusi keuangan di Indonesia. Survei ini dilakukan di 4 provinsi di wilayah timur Indonesia, yaitu di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Melibatkan 20.000 responden di 93 Kabupaten dan 1.250 wilayah pencacahan. Hasilnya, 59 persen masyarakat di empat provinsi yang menjadi sampel masih belum menggunakan layanan perbankan.

Financial development dipercaya menjadi salah satu kunci untuk mengurangi disparitas antara golongan kaya dengan miskin. Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa literasi keuangan nasional naik dari 21,84% pada 2013 menjadi 29,66%. Namun tingkat literasi keuangan di Indonesia timur masih tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat di Sumatera, apalagi di Jawa. Bila dirincikan, rata-rata tingkat literasi keuangan di wilayah Indonesia Bagian Timur per tahun 2016 baru mencapai 25,06%. Berdasarkan survei itu pula, Papua Barat menjadi provinsi yang memiliki literasi keuangan terendah di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 19,27%. Diikuti oleh Nusa Tenggara Barat, sebesar 21,45% dan Papua 22,18%.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *financial development* yang sudah dilakukan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sehingga dengan demikian pemerintah dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah Indonesia Bagian Timur.

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan diartikan kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok. *World Bank* membuat garis kemiskinan absolut US\$1 (berdasarkan PPP 2005 US\$ 1.25) dan US\$2 PPP (*purchasing power parity*/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global/internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah memberikan acuan kemiskinan untuk menentukan garis kemiskinan. Acuan yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi penduduk (*consumption expenditure approach*) dengan batasan kemiskinan berpatokan pada kecukupan kebutuhan kalori (2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non makanan lainnya per hari. Nilai garis kemiskinan digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan seseorang yaitu 2100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumah tangga yang mendasarinya. Jadi menurut BPS, jika seseorang/individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu tersebut dikatakan miskin.

Penelitian yang menguji secara empiris pengaruh dari pengembangan sektor keuangan terhadap penurunan angka kemiskinan diantaranya dilakukan oleh Abu dan Abu (2008) yang membuktikan secara empiris bahwa liberalisasi dalam sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan tidak hanya meningkatkan perkembangan sektor swasta tetapi juga mendorong sektor publik untuk melakukan investasi infrastruktur dan memungkinkan rumah tangga untuk investasi modal manusia serta keuntungan untuk konsumsi. Bukti lain ditunjukkan oleh Inoue dan Harmori (2012) di India bahwa dalam jangka panjang sektor keuangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena sektor keuangan akan dapat menstimulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Levine (2000) membagi fungsi utama sistem keuangan menjadi lima fungsi dasar, yaitu: memobilisasi tabungan, mengalokasikan sumber daya, memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan, memfasilitasi perdagangan, lindung-nilai, diversifikasi, dan penggabungan risiko, dan memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu: jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, semakin besar kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa akses pada berbagai sumberdana (investor), banyak kegiatan usaha yang hanya mampu memproduksi dalam volume relatif kecil sehingga tidak efisien. Sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tetapi banyak.

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Lembaga intermediasi keuangan yang dimanfaatkan secara baik akan mengalokasikan kredit secara efisien, memberdayakan dana tabungan secara optimum, dan melakukan manajemen resiko sehingga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Sehrawat & Giri, 2016).

Odhiambo (2009) menguji pengaruh kausal dinamis (*dynamic causal relationship*) antara pengembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan di Afrika Selatan periode 1960-2006 dengan menggunakan *tri-variate causality test* berdasarkan *error corection model*. Hasil pengujian data dengan menggunakan *Granger-causality* menunjukkan bahwa M2/GDP (sebagai proxy untuk pengembangan sektor keuangan) dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan konsumsi perkapita (sebagai proxy untuk penurunan kemiskinan) dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada pengembangan sektor keuangan.

Beck et al. (2007) menguji dampak pengembangan sektor keuangan terhadap kemiskinan. Temuannya adalah bahwa pengembangan sektor keuangan memperbaiki disparitas pendapatan dan juga mengurangi tingkat kemiskinan akibat dari naiknya pendapatan kelompok berpendapatan rendah. Jeanneney dan Kpodar (2008) dengan menggunakan data panel dari 75 negara berkembang dari tahun 1966 sampai dengan 1999, mengaplikasikan metode GMM untuk menguji pengaruh secara langsung dan tidak langsung (melalui perantara pertumbuhan ekonomi) dari pengembangan sektor keuangan terhadap tingkat kemiskinan. Pengembangan sektor keuangan diukur dengan menggunakan rasio M3/GDP dan juga pinjaman privat terhadap GDP. Instabilitas keuangan (*financial instability*) didefinisikan sebagai nilai rerata absolut dari residual yang diperoleh dari meregresikan indikator dari pengembangan sektor keuangan terhadap nilai lag-nya dan trend linier-nya. Temuan dari studi ini adalah M3/GDP memiliki pengaruh secara langsung yang signifikan atas nilai rata-rata pendapatan dari kelompok berpendapatan rendah. Sementara pengaruh tak langsungnya memberikan nilai yang lebih kecil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi penelitian adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, tabungan dan pinjaman konsumtif yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang berlokasi di wilayah bagian timur Indonesia. Sampel yang digunakan adalah jumlah pengeluaran rata-rata rumah tangga, jumlah pinjaman konsumtif yang disalurkan dan jumlah tabungan yang berada pada bank-bank swasta di propinsi Makuku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat periode 2015 sampai dengan 2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia (SEKDA). Pengembangan sektor keuangan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Cihák, et al. (2012) dan King and Levine (1993), berupa (1) rasio tabungan terhadap PDB (sav/GDP); (2) rasio pinjaman konsumtif terhadap PDB (ln/GDP). Pengeluaran konsumsi (CE) diukur dengan jumlah pengeluaran konsumsi per rumah tangga dalam satu tahun. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan alat pengolah data SPSS versi 22. Berikut model persamaan regresi yang digunakan:

$$CE = a + b_1 \frac{sav}{GDP} + b_2 \frac{ln}{GDP}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

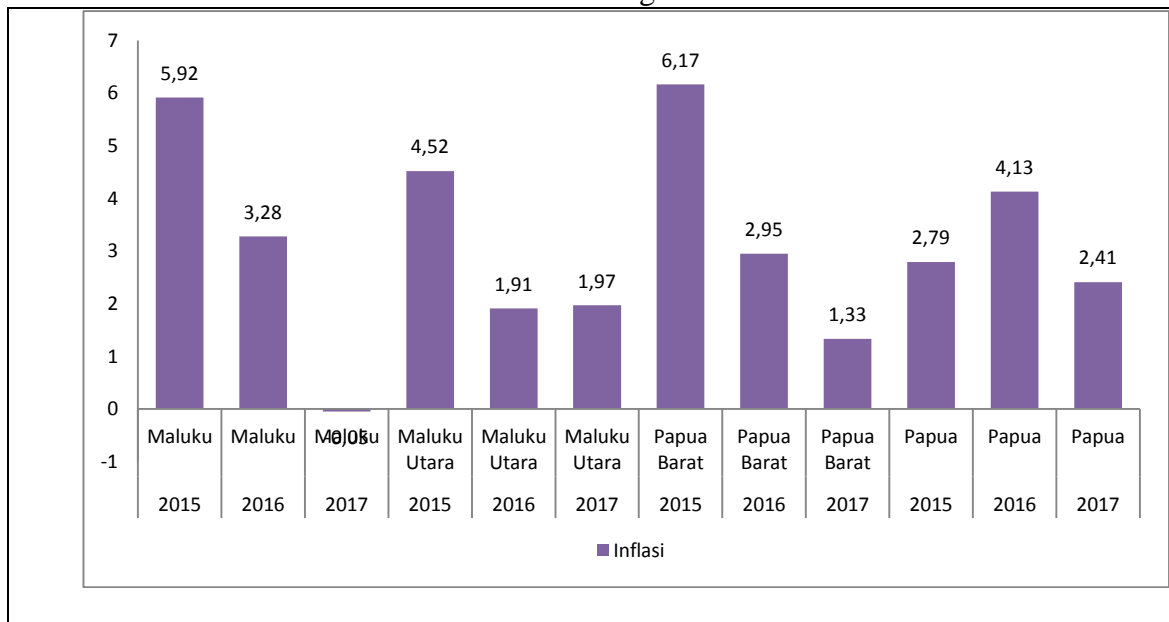
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pertumbuhan konsumsi di empat propinsi yang menjadi wilayah penelitian Propinsi Maluku Utara merupakan propinsi dengan tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertinggi (10,99%) dibandingkan propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. Propinsi Papua merupakan propinsi dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga paling rendah (7,01%). Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung, antara lain pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.

Inflasi

Gambar 1 menunjukkan inflasi yang terjadi di keempat propinsi selama periode penelitian 2015-2017. Inflasi tertinggi terjadi di propinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 6,17 persen. Sementara itu pada tahun 2017 propinsi Maluku mengalami deflasi sebesar -5 persen.

Gambar 1. Tingkat Inflasi



Sumber: Statistik Keuangan Indonesia, 2017, diterbitkan Bank Indonesia

Kinerja propinsi dalam menurunkan inflasi berhasil di tiga propinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat. Maluku Utara mengalami kenaikan inflasi dari 1,91 ke 1,97.

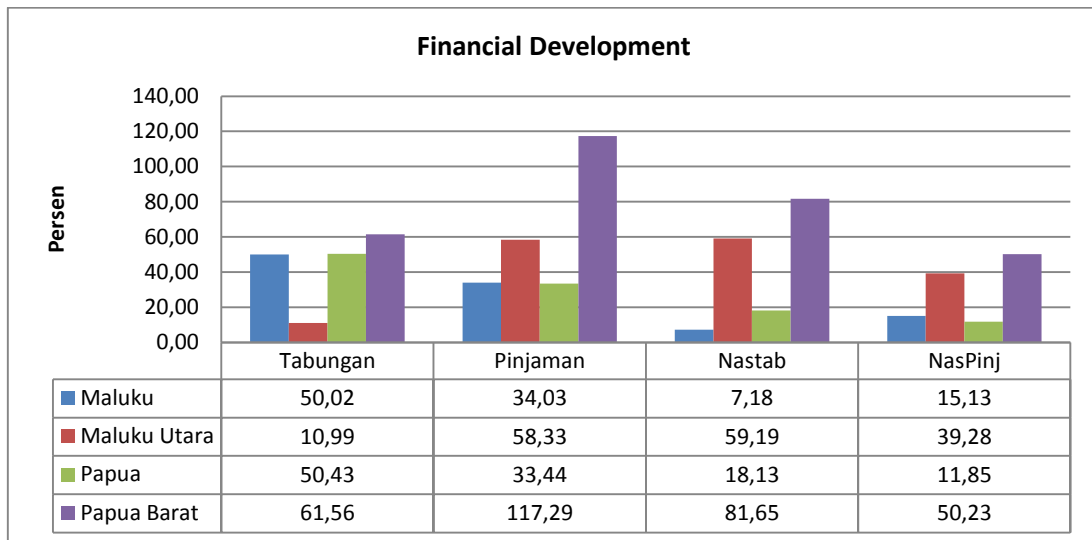
Financial Development

Pertumbuhan nilai nominal tabungan tertinggi ada pada propinsi Papua Barat dengan pertumbuhan tabungan (61,56%). Sementara Maluku Utara merupakan propinsi dengan tingkat pertumbuhan nilai tabungan yang paling rendah (10,99%).

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436



Sumber: Statistik Keuangan Indonesia, 2017, diterbitkan Bank Indonesia

Papua Barat menduduki peringkat tertinggi untuk pertumbuhan pinjaman (117,29%) dan propinsi Papua merupakan propinsi dengan tingkat pertumbuhan pinjaman yang paling rendah (33,44%). Pertumbuhan nasabah tabungan terbanyak adalah propinsi Papua Barat dengan angka pertumbuhan sebesar 81,65 persen. Pertumbuhan nasabah tabungan terendah adalah propinsi Maluku dengan tingkat pertumbuhan 7,18 persen. Pertumbuhan nasabah pinjaman terbanyak adalah propinsi Papua Barat dengan angka pertumbuhan sebesar 50,23 persen. Pertumbuhan nasabah tabungan terendah adalah propinsi Papua dengan tingkat pertumbuhan 11,85 persen. Dari sisi volume, Papua merupakan propinsi dengan jumlah tabungan terbesar (Rp. 100.373 juta) dan jumlah penabung terbanyak (45.625). Propinsi Maluku sebagai propinsi dengan jumlah penyaluran pinjaman terbesar (Rp. 1.266.681 juta) dan jumlah debitur terbanyak (18.181 orang).

Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi berganda ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1. Estimasi Nilai Koefisien Regresi

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.101E7	681774.980		16.152	.000	
	Inflasi	47459.306	144392.975	.028	.329	.752	.975
	Tabungan	.071	.017	.794	4.315	.004	.202
	Pinjaman	-.011	.001	-1.530	-10.094	.000	.298
	Nas_Tab	237.178	41.817	1.048	5.672	.001	.201

a. Dependent Variable: Kon_RT

Pengaruh tingkat tabungan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

Hasil pengujian menunjukkan nilai Beta untuk Tabungan sebesar 0,71 dengan nilai t-hitung sebesar 4,415. Nilai t-hitung ini signifikan pada $\alpha < 0,01$, sehingga dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi per-RT dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat tabungan dapat diterima. Semakin tinggi tingkat tabungan yang terkumpul maka tingkat kemiskinan akan berkurang yang ditandai dengan naiknya pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga.

Pengaruh tingkat pinjaman terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

Hasil pengujian menunjukkan nilai Beta untuk pinjaman sebesar -0,11 dengan nilai t-hitung sebesar -10,094. Nilai t-hitung ini signifikan pada $\alpha < 0,01$, sehingga dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi per-RT dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh tingkat pinjaman dapat diterima. Semakin tinggi tingkat pinjaman akan menurunkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pembayaran utang berkorelasi dengan konsumsi rumah tangga yang diharapkan pada pertumbuhan pendapatan masa depan, maka hubungan antara pertumbuhan konsumsi dengan pembayaran utang saat ini juga positif. Dan banyak rumah tangga membiayai pembelian barang tahan lama dengan utang. Beck *et al.* (2007) mengemukakan salah satu kemungkinan adalah bahwa fungsi utilitas rumah tangga dapat langsung dipengaruhi oleh tingkat utang. Honohan (2004) menawarkan penjelasan rinci untuk menunjukkan bahwa pinjaman adalah transfer sumber daya masa depan ke masa kini untuk meningkatkan konsumsi saat ini. Di bawah kendala anggaran, konsumen membuat keputusan pinjaman untuk memaksimalkan utilitas (Beck *et al.*, 2007)). Jeanneney dan Kpodar (2008) berpendapat bahwa kenaikan utang rumah tangga sebagian besar disebabkan oleh upaya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah untuk mempertahankan standar relatif konsumsi mereka dalam menghadapi perubahan terus menerus dalam distribusi pendapatan.

Bila dilihat antara hubungan pendapatan dan konsumsi dapat digambarkan polanya yaitu: pendapatan lebih besar dari konsumsi maka rumah tangga dapat menabung, bila konsumsi lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit atau dis-saving, dalam pengertian bahwa utang dalam konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh negatif dan pengaruh positif

Pengaruh negatif utang dalam konsumsi rumah tangga menurut Stiglitz (2000) bahwa dalam perilaku utang, dimana pengeluaran konsumsi lebih besar dari pendapatan maka mengakibatkan beberapa dampak negatif pada ekonomi yaitu terperangkap dalam utang, kesulitan pelunasan utang, menanggung beban utang, dan dekat dengan kemiskinan.

Sedangkan pengaruh positif utang dalam konsumsi rumah tangga meliputi: utang berkorelasi dengan pertumbuhan barang tahan lama (non pangan) dan jasa belanja, konsumsi berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter karena dipengaruhi oleh biaya dan ketersediaan pinjaman, kenaikan utang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan disisi lain kenaikan pertumbuhan utang rumah tangga justru mengurangi pertumbuhan konsumsi dimasa datang (Levin *et al.*, 2000). Utang adalah cara membawa konsumsi maju dari masa depan ke saat ini (Greenwood & Jovanovic, 1990). Utilitas konsumsi rumah tangga dapat langsung dipengaruhi oleh tingkat utang, dan utang rumah tangga tetap menjadi prediktor signifikan dari perilaku konsumsi rumah tangga (Baker, 2014). Utang telah menjadi transfer sumber daya masa depan ke masa kini untuk meningkatkan konsumsi.

Pengaruh jumlah nasabah tabungan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

Hasil pengujian menunjukkan nilai Beta untuk nasabah Tabungan sebesar 237,178 dengan nilai t-hitung sebesar 5,672. Nilai t-hitung ini signifikan pada $\alpha < 0,01$, sehingga dengan demikian H_4 yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi per-RT dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh jumlah nasabah tabungan dapat diterima. Semakin banyak nasabah tabunga di suatu daerah maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ditandai dengan kenaikan pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga.

Hasil penelitian Beck *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa perkembangan sektor keuangan berpengaruh dalam penurunan kemiskinan bahkan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor keuangan membantu masyarakat miskin dalam pembiayaan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan agregat hingga 60 persen.

Kajian Quartey (2005) menunjukkan bahwa adanya hubungan jangka panjang antara perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hubungan kausalitas dua arah terjadi antara sektor keuangan dan pengentasan kemiskinan. Sektor keuangan yang menyebabkan kemiskinan dan sebaliknya. Kausalitas dua arah juga ditemukan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kajian Odhiambo (2009) melaporkan hal yang sama, bahwa dalam jangka panjang pengentasan kemiskinan menyebabkan perkembangan sektor keuangan. Sedangkan dalam jangka pendek, terdapat efek feedback (dua arah) antara pengentasan kemiskinan dengan perkembangan sektor

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Tabungan sebagai indikator *financial development* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga. Tabungan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan di wilayah bagian timur Indonesia.

Pinjaman sebagai indikator *financial development* memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga. Pinjaman akan mengurangi pengeluaran konsumsi dikarenakan bagian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk membayar cicilan hutang dan bunga dari pokok pinjaman.

Pemerintah perlu menggerakkan kegiatan menabung untuk menekan angka kemiskinan. Istilah menabung harus diperluas yaitu tidak hanya berbentuk uang, tapi juga saham, reksadana, cicilan di lembaga pembiayaan, hingga emas di pegadaian. Sehingga, akses masyarakat ke sektor keuangan juga meningkat dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Umpan balik antara perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia menyiratkan bahwa kebijakan yang akan diambil untuk pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, selanjutnya lebih jauh akan dapat memfasilitasi pengembangan sektor keuangan.

Secara teoritis studi ini masih banyak keterbatasan, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan jenis data yang berbeda dalam mengukur variabel – variabel yang digunakan. Misalnya, kemiskinan yang diukur melalui jumlah orang miskin, tingkat pendapatan dan lain sebagainya. Sektor keuangan yang diukur

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

melalui rasio cadangan bank terhadap aset bank, aset lancar (M3/PDB) dan proksi lainnya,. Terakhir, akan lebih baik kiranya bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan data dengan jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Bader, S. and Abu-Qarn, A.S. (2008), "Financial development and economic growth: the Egyptian experience", *Journal of Policy Modeling*, Vol. 30 No. 5, pp. 887-898.
- Beck, T., Demirgüç, Kunt, A. and Levine, R. (2007), "Finance, inequality and the poor", *Journal of Economic Growth*, Vol. 12 No. 1, pp. 27-49.
- Cihák, M., A. Demirgüç-Kunt, E. Feyen, R. Levine, 2012. "Benchmarking Financial Systems Around the World". World Bank Policy Research Working Paper 6175.
- Honohan, P. (2004), "Financial development, growth and poverty: how close are the links?", in Goodhart, C. (Ed.), *Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Inoue, T. and Hamori, S. (2012), "How has financial deepening affected poverty reduction in India? Empirical analysis using state-level panel data", *Applied Financial Economics*, Vol. 22 No. 5, pp. 395-408.
- Jeanneney, S.G. and Kpodar, K. (2008), "Financial development and poverty reduction: can there be a benefit without a cost?", IMF Working Paper No. WP/08/62, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Levine, R., 2005. "Finance and Growth: Theory and Evidence." in P. Aghion & S. Durlauf, eds., *Handbook of Economic Growth*, 1st ed. Vol. 1, Chapt. 12, 537-58.
- Levine, R., Loayza, N. and Beck, T. (2000), "Financial intermediation and growth: causality and causes", *Journal of Monetary Economics*, Vol. 46 No. 1, pp. 31-77.
- Odhiambo, N.M. (2009), "Finance-growth-poverty nexus in South Africa: a dynamic causality linkage", *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 38 No. 2, pp. 320-325.
- Odhiambo, N.M. (2009), "Finance-growth-poverty nexus in South Africa: a dynamic causality linkage", *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 38 No. 2, pp. 320-325.
- Quartey, P. (2005), "Financial sector development, savings mobilisation and poverty reduction in Ghana", UNU-WIDER Research Paper No. 2005/71, United Nations University, Helsinki
- Sehrawat, M., and Giri, A. K. (2016) "Financial development and poverty reduction in India: an empirical investigation", *International Journal of Social Economics*, Vol. 43 Issue: 2, pp.106-122, [https:// doi.org/10.1108/IJSE-01-2014-0019](https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2014-0019).
- Setiawan, S. (2015). FINANCIAL DEPTH AND FINANCIAL ACCESS IN INDONESIA. *Journal of Indonesian Economy and Business : JIEB.*, 30(2), 139-158.

**National Conference of Creative Industry:
*Sustainable Tourism Industry for Economic Development***

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

E- ISSN No: 2622-7436

Stiglitz, J. (2000), "The contribution of the economics of information to twentieth century economics", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115 No. 4, pp. 1441-1478.

Stiglitz, J. (2000), "The contribution of the economics of information to twentieth century economics", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115 No. 4, pp. 1441-1478.